

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah satu usaha sadar dan terencana dengan tujuan membangun masyarakat menuju pada cita-cita kemerdekaan. Cita-cita kemerdekaan mengandung pesan yang sangat luas, meliputi : fisik dan non fisik, materi dan bukan materi. Untuk ketercapaian cita-cita tersebut, semua sumberdaya digerakan secara maksimal namun tetap untuk kemanfaatan sekarang dan berkelanjutan. Menuju pencapaian cita-cita kemerdekaan, maka negara harus memastikan proses pembangunan bangsa dapat terlaksana dengan baik (Retnaningsih, 2015). Pesan pembangunan sebagai rangkaian aktifitas berkesinambungan dan kolektif, konsisten dan berkelanjutan dan menjadi keniscayaan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta dan masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama baik dari aspek materil maupun aspek spritual (Wirawan dan Nurpratiwi, 2015).

Perspektif pembangunan yang berbasis masyarakat, dapat diartikan sebagai usaha sadar dalam meningkatkan kemampuan masyarakat baik dari dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, agar dapat mempengaruhi masa depannya. Ketercapaian pembangunan hanya dapat dideteksi bila mampu menciptakan kondisi hidup masyarakat jauh lebih baik dibanding sebelum pembangunan dilaksanakan. Dalam pandangan ekonomi klasik, indikator yang menjadi penanda bahwa ketercapaian pembangunan suatu negara/bangsa dapat dilihat dari seberapa besar tingkat pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan

pembangunan, terutama yang dilakukan pemerintah adalah melalui pertumbuhan ekonomi (Sofyan, 2017).

Pembangunan itu sangat berhubungan erat dengan kebijakan. Suatu pembangunan harus dilandasi oleh kebijakan yang dijadikan sebagai pedoman dalam proses pelaksanaannya. Oleh karenanya didalam kebijakan tersebut terdapat arahan serta larangan yang dapat menjamin terlaksananya proses pembangunan yang terarah dan sesuai dengan tujuan, yaitu pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 1999).

Pembangunan daerah menjadi bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu. Sasaran utama pembangunan daerah adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, termasuk di dalamnya pemerataan pendapatan antar daerah. Peran pemerintah daerah sebagai mobilisator pembangunan sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Pembangunan ekonomi daerah menurut Basuki dan Prawoto (2015), mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat lokal dan dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif membangun daerahnya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus

berupaya menggunakan sumber daya yang ada di daerah tersebut sebagaimana mestinya untuk kesejahteraan masyarakat banyak dan mendorong perekonomian untuk lebih maju. Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini menurut Badrudin (2012), dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari peningkatan tingkat Pendidikan, Kesehatan, dan Pengeluaran Perkapita Masyarakat yang diukur atau diketahui dari angka indeks yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI) merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. Kualitas IPM suatu daerah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam menilai kesejahteraan masyarakat. Terdapat tiga dimensi dalam IPM yang meliputi meliputi: 1) umur panjang dan hidup sehat, yaitu angka harapan hidup saat lahir; 2) pengetahuan, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; dan 3) dan standar hidup layak, yaitu pengeluaran perkapita. Dari ketiga dimensi tersebut, muncul tiga indeks yang meliputi indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran.

Deskripsi tentang keberhasilan pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat melalui ukuran besaran pengeluaran atau belanja pemerintah, sebab belanja pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mempengaruhi masa depannya. Dengan melakukan belanja, pemerintah dapat memenuhi kebutuhannya sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah dengan optimal. Selain untuk memenuhi kebutuhan internal pemerintah sendiri, belanja pemerintah juga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Belanja modal dan belanja barang/jasa pemerintah salah satu bagian belanja pemerintah memiliki peranan penting dalam memajukan peradaban masyarakat melalui pembangunan berbagai infrastruktur publik, seperti infrastruktur lalu lintas, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, hingga infrastruktur energi. Namun, realisasi belanja modal dan barang dan jasa banyak mengalami hambatan terutama berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang dipersepsi rumit dan birokratis. Hal ini berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi belanja barang dan belanja modal. Arif (2012) dalam penelitiannya menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi belanja di Provinsi Riau adalah faktor regulasi, politik, proses pengadaan, serta komitmen organisasi. Ruwaida *et al.* (2015) menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi belanja di Provinsi Aceh adalah faktor perencanaan, regulasi, SDM, teknis, koordinasi, serta pengadaan barang dan jasa. Febrianti dan Adi (2015) menemukan faktor-faktor yang

mempengaruhi realisasi belanja di Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, adalah faktor koordinasi, pengelolaan/pengadaan, pengendalian, dan pemilihan staf.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, penulis tertarik melakukan penelitian di lingkungan pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan dengan judul, “ Pengaruh Belanja Barang / Jasa Pemerintah terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia: Studi Empiris di Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, masalah penelitian ini adalah bagaimana belanja barang/jasa pemerintah dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia ?

Rumusan masalah di atas dapat dimunculkan pertanyaan atas penelitian ini yaitu:

1. Apakah belanja barang dan jasa di Dinas Pendidikan Nasional berpengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Halmahera Selatan?
2. Apakah belanja barang dan jasa di Dinas Kesehatan berpengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Halmahera Selatan?
3. Apakah belanja barang dan jasa di Dinas Sosial berpengaruh terhadap

peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Halmahera Selatan?

4. Apakah belanja barang dan jasa di RSUD berpengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Halmahera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh belanja barang dan jasa di Dinas Pendidikan Nasional terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Halmahera Selatan
2. Pengaruh belanja barang dan jasa di Dinas Kesehatan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Pengaruh belanja barang dan jasa di Dinas Sosial terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Pengaruh belanja barang dan jasa di RSUD terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Halmahera Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dilihat baik dari segi teori maupun terapan antara lain:

1. Sebagai persyaratan mencapai gelar sarjana magister S2

konsentrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Sebagai masukan dan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya tentang pentingnya belanja barang/jasa pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dilihat dari indeks pembangunan manusia
3. Sebagai masukan bagi Pemerintah Halmahera Selatan, untuk mengkaji kembali belanja barang/jasa disetiap organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan prinsip value for money agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan.